

## MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENTAWAI MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL DI PULAU SIBERUT

### *EMPOWERMENT MODEL OF THE POOR IN MENTAWAI THROUGH LOCAL INSTITUTIONS IN SIBERUT ISLAND*

**Erwin**

Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

**E-mail:** [erwin\\_antro@yahoo.com](mailto:erwin_antro@yahoo.com)

Diterima: 14 Desember 2014; Direvisi: 26 Februari 2015; Disetujui: 18 Maret 2015

#### **Abstrak**

Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa kriteria dan ukuran rumah tangga miskin harus dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki kriteria dan ukuran sendiri, yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang berakar pada daya dukung budaya, agama dan lingkungan. Kelembagaan lokal yang dimiliki masyarakat jika diperkuat dan diberdayakan akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi menurut budaya masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kriteria dan indikator rumah tangga miskin dalam pandangan publik. (2) untuk menganalisis strategi rumah tangga miskin untuk memanfaatkan pada sumber daya ekonomi, alokasi tenaga kerja dalam rumah tangga. (3) untuk menganalisis profil program, pola implementasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. (4) Menganalisis energi sosial kreatif yang mencakup sistem nilai, norma, dan kepemimpinan kelembagaan dan modal sosial dapat digunakan untuk mewujudkan potensi inovatif kesejahteraan umum, baik di tingkat unit kekeluargaan atau unit lokalitas masyarakat terpencil adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi, metode dan teknik pengumpulan data kualitatif, observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan terdiri dari: kepala desa atau sekretaris desa, kepala pertemuan desa dan kepala desa, sedangkan informan biasa sebanyak 30 kepala keluarga yang termasuk dalam kategori penilaian masyarakat miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (a) Masyarakat Mentawai memiliki kriteria dan ukuran sendiri tentang kemiskinan dan rumah tangga miskin. (b) Kelembagaan berbasis kekerabatan (suku) memiliki peran strategis, jika diberdayakan untuk memecahkan masalah kemiskinan. (c) Masyarakat Mentawai memiliki modal/energi sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang didasarkan pada (i) Tanah sebagai aset komunal yang belum digunakan dan dikelola untuk usaha produktif. (ii) Solidaritas sosial yang kuat (saling percaya, tolong menolong dan kerjasama yang saling menguntungkan) di tingkat keluarga dan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan perumahan. Model pemberdayaan yang dapat dilakukan, antara lain dengan revitalisasi pertanian lokal (pertanian organik) kekerabatan kelembagaan berbasis (suku). Pemerintah Daerah diharapkan membangun pasar tradisional, lembaga keuangan mikro atau koperasi dan membuka isolasi desa dengan membuka sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan desa-desa di pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Kata kunci:** kemiskinan, kelembagaan lokal, model pemberdayaan.

#### **Abstract**

*The study was based on the premise that the criteria and size of poor households should be returned to the community. Society has its own criteria and size are strongly influenced by the value system that is rooted in the cultural, religious and environmental carrying. Local institutions that owned by the community capable to answer the problems that faced by the community if those have been strengthened and empowered. This study aims to (1) analyze the criteria and indicators of poor households in the view of the public. (2) to analyze the strategies of poor households to capitalize upon the economic resources, the allocation of labor in the household. (3) to analyze the profile of the program, implementation patterns that have been and are being implemented by the government and non-governmental organizations. (4) Analyze the creative social energy that includes a system of values, norms, and institutional leadership and social capital can be used to realize the innovative potential of the common welfare, both at the level of the kinship unit or*

*units locality remote indigenous communities. This study uses the Anthropology approach, the method and qualitative data collection techniques; observation, in-depth interviews and focus group discussion (FGD). Informants research consist of 8 key informants, which are; village head or village secretary, chief village meetings and village heads, while the regular informant as much as 30 heads of households are included in the category of poor people's judgment. The findings showed that (a) Mentawai Communities have their own criteria and measures of poverty and poor households. (b) Institutional-based kinship (tribe) has a strategic role, if empowered to solve the problem of poverty. (c) Mentawai Communities have social capital / social energy to overcome the problem of poverty, which is based on (i) Land as a communal asset that has not been used and managed for productive ventures. (ii) The strong social solidarity (mutual trust, mutual help and cooperation) in the family and community level, in meeting the needs of food and housing. Empowerment model that can be done, among others, by revitalizing local agriculture (organic farming) institutional-based kinship (tribe). Local governments are expected to initiate the birth of traditional markets and microfinance institutions in the form of a cooperative and open the isolation of the villages in the interior of the Mentawai Islands.*

**Keywords:** *poverty, local institutional and empowerment model.*

## PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun 2008 berjumlah 23.385 (22,07 persen), pada tahun 2010 meningkat menjadi 32.300 (30 persen) dari total penduduk Sumbar 4,5 juta (BPS Sumatera Barat: 2010). Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati rangking tertinggi dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, dimana sebanyak 80 persen dari penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, total 66.332 jiwa, sekitar 53.000 jiwa masih hidup di dalam kemiskinan.

Masyarakat Mentawai sulit membedakan mana rumah tangga miskin, hampir miskin dan tidak miskin. Kalau digunakan 14 (empat belas) indikator rumah tangga miskin, yang dikemukakan Biro Pusat Statistik (2010). Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati rangking tertinggi, dimana sebanyak 80 persen dari warga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjumlah 66.332 jiwa, yaitu sekitar 53.000 jiwa hidup di dalam kemiskinan. Data tersebut menunjukkan tingginya angka kemiskinan pada masyarakat Mentawai. Pertanyaan adalah apakah indikator kemiskinan yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik masyarakat Mentawai. Indikator yang seragam seringkali

tidak menangkap realitas sosial budaya pada berbagai komunitas adat di Indonesia. Pola hidup masyarakat di Indonesia sangat beragam dan multikultur. Adanya tujuh (7) bentuk pola hidup di Indonesia yang berbeda-beda tetapi hidup bersamaan dapat menjadi tolok ukurnya. Masyarakat Indonesia terdiri dari sukubangsa yang beraneka ragam dan berbeda latar belakang pola hidup seperti berburu meramu, berladang pindah, beternak di lahan savanna, nelayan, perladangan tadah hujan, pertanian irigasi, industri jasa. Pada masing-masing pola hidup, dapat diasumsikan bahwa kriteria tentang miskin dan kesejahteraan hidup pasti akan beraneka ragam. Dengan demikian ukuran yang digunakan hendaknya melihat konsep-konsep yang ada pada masing-masing budaya masyarakat yang bersangkutan (Rudito, 2013).

Adanya kondisi sosial budaya yang beragam di Indonesia, memerlukan tersedianya indikator kemiskinan yang dapat mengakomodasi variasi sosial budaya, agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Artinya, miskin-tidaknya bergantung antara lain; kepemilikan tanah pertanian, kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan mengadakan hajatan rumah tangga, kemampuan menyediakan makanan konsumsi sehari-hari,

tingkat kesulitan hidup, dan kepemilikan hewan ternak dan kondisi rumah tertentu.

Usaha pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan terlihat dalam sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, seyogyanya dipandang sebagai momentum untuk mewujudkan desentralisasi pembangunan dan mempercepat usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mubyarto (1998), kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Lebih jauh menurut Mubyarto (1998), untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat.

Keragaman lokalitas ekosistem masyarakat dapat merefleksikan perbedaan dan kekhususan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dan komunitas miskin. Karakteristik kemiskinan dalam hal ini menyangkut ukuran kemiskinan menurut pandangan setempat (lokal) dan sifat kemiskinan itu sendiri (struktural, alami atau keduanya). Jika dikenal dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alami, maka perbedaan sistem sosial (struktur dan nilai budaya) dan ekosistem (alam) tipe perdesaan itu dengan sendirinya sudah menunjuk pada perbedaan faktor-faktor penyebab kemiskinan (Sitorus. 1991).

Optimalisasi alokasi dan pola distribusi sumberdaya dalam rumah tangga dan dalam masyarakat dapat dilihat sebagai usaha mengatasi kemiskinan. Untuk itu, penting memahami konsep energi sosial, suatu kekuatan internal yang ada dalam masyarakat. Konsep energi sosial budaya ini menunjuk pada tiga

aspek, yaitu: (a) gagasan (*ideas*) dasar yang disepakati tentang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita (*ideal*) yang disepakati untuk mencapai tujuan, dan (c) kebersamaan (*friendship*) dalam upaya mencapai tujuan. Energi sosial itu terdapat pada satuan lokalitas dalam bentuk pranata-pranata yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Modal sosial menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, di dalamnya mencakup jaringan sosial, sistem norma dan sistem nilai yang mengatur relasi antar individu dan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok (Erwin, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah kemiskinan dari dimensi kebudayaan dan keadaan lokalitas masyarakat Mentawai. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- (1) Menganalisis indikator dan kriteria rumah tangga miskin menurut pandangan masyarakat.
- (2) Menganalisis strategi rumah tangga miskin dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dan alokasi tenaga kerja.
- (3) Menganalisis profil program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Menganalisis energi sosial kreatif yang mencakup sistem nilai, norma, kelembagaan dan kepemimpinan yang dapat dijadikan modal sosial dan potensi inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, baik pada tataran satuan kekerabatan maupun satuan lokalitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi untuk mendapatkan gambaran tentang cara berpikir dan cara berperilaku masyarakat. Lokasi penelitian di Desa Madobag dan Desa Matotonan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Pada setiap desa telah dilakukan wawancara

mendalam dengan 8 orang informan kunci yang terdiri dari empat pemimpin formal ; kepala desa, sekretaris desa, ketua badan musyawarah desa dan kepala dusun. Untuk informan biasa telah dilakukan wawancara mendalam dengan 30 kepala rumah tangga. FGD dilakukan di kedua desa, yang peserta terdiri dari pemimpin formal dan informal serta kepala rumah tangga, pada setiap desa berjumlah 18 orang laki-laki dan perempuan. Variasi warga dalam FGD menjadi penting, agar pemahaman tentang subjek kajian lebih mendalam. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, untuk mendapatkan data tentang tingkat kemiskinan, program pembangunan yang dilaksanakan pada masyarakat Mentawai di Pulau Siberut.

Data dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya untuk menggambarkan profil rumah tangga miskin dan kelembagaan lokal yang berperan pada masyarakat. Data di analisis melalui pemahaman interpretatif (*verstehen*), terutama berkaitan dengan keberadaan modal sosial, mencakup sistem nilai, norma, kelembagaan dan kepemimpinan yang merupakan modal sosial pada tataran kekerabatan dan lokalitas. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan tentang indikator rumah tangga miskin dan kelembagaan lokal yang paling diharapkan berperan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

## HASIL PENELITIAN

### Kondisi Sosial Ekonomi

Sistem perekonomian masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, masih berada pada level ekonomi subsistensi, ekonomi dari tangan ke mulut. Mata pencaharian utama masyarakat adalah berburu, meramu hasil hutan dan berladang. Teknologi yang digunakan dalam mengolah sumber daya alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, secara sederhana. Pada masyarakat Mentawai, kegiatan

ekonomi yang dilakukan erat sekali kaitannya dengan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam kehidupan sehari-hari keluarga luas patrilineal berfungsi sebagai unit produksi dan unit konsumsi, dengan sistem pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin. Berbagai usaha dilakukan oleh keluarga luas matrilineal, agar kebutuhan seluruh anggota keluarga luas matrilineal dapat bertahan sebagai suatu unit produksi dan konsumsi. Setiap keluarga luas patrilineal akan memiliki sebuah rumah besar yang disebut dengan Uma. Uma merupakan tempat tinggal dari satu keluarga luas patrilineal, berfungsi antara lain; tempat berlangsungnya berbagai upacara adat.

Sumber makanan pokok masyarakat Mentawai adalah sagu, talas dan pisang, sedangkan sumber makanan protein adalah babi, ayam, ikan dan kerang tersedia dalam jumlah, lebih dari cukup. Setiap keluarga luas patrilineal akan memiliki tanaman: kebun tanaman enau, untuk diambil sagunya; kebun kelapa; kebun pisang; kebun keladi dan kebun durian serta tanaman lainnya; memiliki ternak; seperti babi, ayam dan beberapa keluarga luas patrilineal mulai memelihara sapi

Mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun dan berladang, dengan tanaman utama adalah sagu (*enau*), pisang, keladi, kelapa dan tanaman yang beberapa jenis tanaman yang berorientasi pasar, seperti; coklat, pinang, cengkeh, manau dan nilam. Kawasan perladangan berada di luar areal pemukiman sampai ke tengah hutan. Disamping bercocok tanam, masyarakat juga memiliki mata pencaharian lainnya, seperti berternak dan menangkap ikan. Hasil penjualan coklat, pinang, manau dan rotan, biasanya hasil yang mereka dapatkan dalam satu bulan berkisar antara Rp 100.000,- sampai Rp 400.000,-. Kegiatan di ladang ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam pekerjaan di ladang,

pekerjaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Perbedaan hanya terletak pada saat pembukaan lahan baru dan pembersihan lahan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan selain memasak untuk rumah tangganya dan bekerja di kebun keladi dan pisang, juga membantu pekerjaan di ladang.

### **Kriteria Masyarakat Setempat Tentang Kemiskinan**

Suparlan (1994), mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. BPS mendefinisikan kemiskinan dengan dua cara yaitu ukuran pendapatan dan ukuran non pendapatan. Ukuran pendapatan melihat kemiskinan dari tingkat pendapatan/pengeluaran individu untuk memenuhi konsumsi/kebutuhan pokok minimum masyarakat. Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada makanan yang menghasilkan energi 2100 kilo kalori per orang setiap hari. Sedangkan untuk ukuran lain, dilihat dari rendahnya akses masyarakat kepada pelayanan dasar seperti: (1) perumahan; (2) pendidikan; (3) pelayanan kesehatan; (4) fasilitas sanitasi dan layanan air bersih; dan (5) keterbatasan terhadap akses pendanaan dan kapasitas usaha, dan lain-lain.

Terminologi “miskin”, yang dikenal oleh masyarakat Mentawai dalam dua istilah; *pertama*, orang miskin disebut dengan Simagebak artinya miskin; *kedua*, orang miskin disebut dengan Simalilimai, artinya tidak punya apa-apa. Kedua konsep merujuk pada penduduk pendatang (baik untuk penduduk yang berasal dari suku Mentawai atau suku bangsa lainnya, yaitu Minangkabau, Jawa, Batak, dan lainnya) yang tinggal di satu lokasi pemukiman penduduk atau desa. Biasanya penduduk pendatang

tidak memiliki tanah, kebun atau ladang dan tidak memiliki ternak. Tanah yang digunakan pendatang untuk membangun rumah, berkebun dan berladang adalah tanah milik suku lain yang diperoleh dengan mengikuti ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Mentawai.

Menurut tokoh masyarakat, makna kata miskin ditujukan pada rumah tangga yang kondisinya sebagai berikut: 1) Kebun sagu, kebun keladi dan kebun pisang satu bidang. 2) Tidak memiliki ternak babi. 3) Tidak memiliki rumah di kampung, hanya memiliki pondok di kebun. 4) Tanah yang dijadikan kebun merupakan tanah milik suku lain. Menurut pemimpin informal (kepala suku), kriteria rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang sukunya memiliki tanah ulayat yang terbatas, sehingga rumah tangga dalam suku, hanya memiliki, kebun pisang, keladi dan pohon sagu yang jumlahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang ada dalam suku. Tidak memiliki ladang yang ditanami tanaman tua, seperti kelapa, durian dan tanaman hutan lainnya.

Penelusuran data melalui FGD di Desa Madobag dan Desa Matotonan tentang kriteria rumah tangga miskin adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang tidak mampu membeli beras, hanya mengkonsumsi beras pada waktu tertentu saja.
2. Rumah tangga yang tidak memiliki tanah, dan tinggal di pondok dekat kebun atau dekat kandang babi.
3. Semua penduduk desa, kecuali penduduk desa yang bekerja sebagai pegawai negeri, kepala desa dan perangkat desa.
4. Rumah tangga yang kepala keluarganya tidak memiliki penghasilan tetap.
5. Rumah tangga yang menempati rumah yang kondisinya rusak dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki.

6. Rumah tangga, dimana anak-anaknya hanya berpendidikan dasar, tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Di lihat dari kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin di Desa Madobag dan Desa Matotonan, dari 30 rumah tangga yang dijadikan sebagai informan, menunjukkan ada kesamaan ciri rumah tangga miskin di kedua desa. Di Desa Madobag dan Desa Matotonan, menurut informan semua rumah tangga berhak menerima bantuan raskin, kecuali rumah tangga pegawai negeri dan perangka desa. Dari 30 kepala keluarga yang dijadikan sebagai informan, memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Semua rumah tangga menempati rumah yang di bangun oleh Kemensos. Sepuluh buah rumah (33 %) sudah diperbaiki, dengan menambah luas, ganti atap dan dinding rumah. Pada dasarnya setiap rumah tangga memiliki rumah di lahan atau ladang masing-masing dan biasanya juga disertai dengan kandang babi yang disebut juga dengan rusuk.
2. Pendidikan orang tua tertinggi SD dan anak-anak sudah ada yang melanjutkan pendidikan ke SMP, dan bahkan di dusun Ugai dan Rogdog bagian dari desa Madobak ada yang lulusan SMA dan juga perguruan tinggi, di desa Ugai terdapat guru lulusan SMA dan juga yang lulusan perguruan tinggi.
3. Pekerjaan kepala rumah tangga adalah petani dalam konteks ini adalah mengolah lahan untuk tanaman keladi, dan pisang 60 %, sementara 40% kepala rumah tangga bekerja sebagai peladang dan Pedagang atau peladang dan menyewakan boat dan sepeda motor.
4. Pendapatan rata-rata perbulan, (a) 40% penghasilan rumah tangga Rp 125.000,- s/d Rp 300.000,- (b) 40 % penghasilan di atas Rp 300.000,- s/d Rp 600.000,- (c) 20 % rumah tangga memiliki penghasilan dia atas Rp 600.000,-

5. Alat transportasi yang dimiliki, sekitar 60 % memiliki perahu tidak bermesin, sekitar 40 % memiliki perahu bermesin (pong-pong) atau sepeda motor.

6. Ternak besar yang dimiliki, semua rumah tangga memiliki ternak babi. Bagi Rumah Tangga Islam, ternak babi bukan untuk dikonsumsi, akan tetapi untuk dijual, dan juga untuk upacara adat seperti upacara berkaitan dengan *life cycle*, upacara untuk mendirikan Uma, upacara untuk persahabatan dan upacara sosial lainnya. Di Desa Matotonan dan Desa Madobag beberapa rumah tangga Islam sudah mulai beternak Sapi.

Kalau dibandingkan, data sosial ekonomi rumah tangga miskin dengan data *focus group discussion* tentang konsepsi lokal mengenai kriteria rumah tangga miskin terlihat tidak jauh berbeda, yaitu rumah tangga yang tidak mampu membeli beras, hanya mengkonsumsi beras pada waktu tertentu saja. Di kedua desa, menurut informan belum ada rumah tangga yang mengkonsumsi beras tiga kali dalam satu hari, kecuali rumah tangga pegawai negeri (guru atau para medis).

Ketersediaan pangan lokal seperti: sagu, keladi dan pisang dalam setiap rumah tangga lebih dari cukup. Menurut informan, mengolah batang sagu menjadi tepung sagu, saat sekarang hanya memerlukan waktu paling lama sepuluh hari. Kerja sepuluh hari akan dapat menghasilkan tepung sagu tujuh sampai delapan *tampin*. *Tampin* adalah alat tempat penyimpanan sagu secara tradisional, terbuat dari pelepah pohon sagu dan pinang). Satu *tampin* bisa memuat tepung sagu 80 Kg s/d 100 Kg. Artinya, apabila setiap rumah tangga mengolah pohon sagu, dengan tenaga kerja 2 atau 3 orang, selama sepuluh hari akan menghasilkan tepung sagu sebanyak 650 Kg sampai dengan 700 Kg, dan hasil tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan 5 sampai dengan 6 anggota rumah tangga 4 sampai 5 bulan. Artinya,

kebutuhan pangan lokal, sagu, keladi dan pisang masih lebih dari cukup.

Masalah utama yang dihadapi rumah tangga adalah sulitnya untuk memperoleh uang tunai. Sistem barter masih mendominasi transaksi antara petani dengan pedagang; pinang, coklat, manau dan rotan di tukar dengan gula, kopi, teh, garam, minyak goreng, minyak tanah dan kebutuhan lainnya, termasuk rokok. Hampir semua rumah tangga kepala keluarga (laki-laki dan perempuan) punya kebiasaan merokok.

Data-data pengeluaran pada setiap rumah tangga menunjukkan angka yang berbeda dengan data penghasilan dari rumah tangga. Dengan membandingkan data pengeluaran setiap rumah tangga, dengan jumlah anak 4 orang, maka diperlukan biaya bulanan, sebesar Rp 520.000,- Rincian, sebagai berikut; Minyak tanah Rp 40.000,-; Beras Rp 230.000,-; Gula, Kopi, Teh Rp 80.000; Minyak goreng dan garam Rp 90.000,-; Rokok Rp 30.000,-

Kondisi fisik rumah yang ditempati masyarakat Mentawai masih sangat sederhana, sebagian besar tinggal di rumah yang beratapkan rumbia, dengan dinding papan bermutu rendah, dan lantai sebagian besar dari papan. Pada beberapa rumah tangga masih saja ditemui rumah yang berlantaikan tanah. Hampir 85 % dari rumah yang ada merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian Sosial. Pada beberapa rumah tangga kita melihat, rumah yang dibangun Kementerian Sosial, sudah hampir roboh, akan tetapi sebagian rumah tangga juga sudah mampu untuk memperbaikinya, sehingga beberapa rumah yang ada di perdesaan Kabupaten Kepulauan Mentawai kondisinya sudah baik.

### **Potensi Kelembagaan Lokal berbasis Suku**

Peran kelembagaan lokal berbasis suku atau kekerabatan sangat dirasakan oleh masyarakat,

tidak saja menyangkut kegiatan upacara selingkar hidup akan tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari seluruh anggota keluarga luas patrilineal. Bantuan sosial ekonomi secara langsung akan diberikan kepada seluruh anggota keluarga luas patrilineal yang memerlukan, terutama apabila ada anggota keluarga yang sakit, meninggal dunia dan musibah lainnya. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, seluruh anggota suku dapat menebang pohon sagu yang tumbuh di atas tanah miliki suku. Artinya, kebutuhan seluruh anggota suku untuk memenuhi kebutuhan pangan tercukupi dalam jumlah yang jauh lebih dari cukup, tidak ada kelaparan pada masyarakat Mentawai.

Pengembangan kelembagaan lokal berbasis suku, dapat dilihat dalam konteks usaha yang terencana untuk mengembangkan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, memperbaiki dan meningkatkan sinkronisasi hubungan kerja dalam kelembagaan sehingga semua pengurus terdorong untuk meningkatkan kinerja individu dan kinerja kelembagaan. Ada beberapa pandangan tentang lembaga sebagai organisasi dan lembaga sebagai institusi. Untuk ada empat cara untuk membedakannya: 1) bahwa kelembagaan cenderung tradisional sedangkan organisasi cenderung modern, 2) kelembagaan berasal dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas, 3) kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum di mana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga dan 4) organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Kelembagaan (institusi) memberi tekanan pada lima hal, yaitu : 1) berkenaan dengan aspek sosial, 2) berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku individu dalam sistem sosial, 3) berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak yang mantap dan sudah berjalan lama dalam

kehidupan masyarakat, 4) ditekankan pada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi dalam kehidupan masyarakat dan 5) pemaksanaan kelembagaan diarahkan pada cara-cara yang baku untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam sistem sosial tertentu.

Potensi kelembagaan lokal berbasis suku pada masyarakat Mentawai masih dimungkinkan, apabila dilakukan secara sungguh-sungguh, mengingat ada sejumlah kelemahan dan kekuatan. Kelembagaan lokal berbasis suku pada Masyarakat Mentawai di Pulau Siberut memiliki beberapa kekuatan, antara lain: (1) pada beberapa suku di Desa Madobag dan Desa Matotonan, sumber daya manusia di tingkat suku sudah ada yang menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana; (2) sumber daya manusia di tingkat suku sudah ada yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat di tingkat lokal dan regional; (3) Suku memiliki aset dalam bentuk tanah dalam jumlah yang cukup, namun belum dimanfaatkan; (4) solidaritas sosial masih kuat di tingkat suku dan merupakan sumber energi sosial untuk dikembangkan; (5) dalam konteks pengembangan pariwisata budaya, peran pemimpin suku dalam upacara selingkar hidup sangat penting dan kedudukan Uma (rumah adat yang dijadikan tempat tinggal bersama seluruh anggota suku) masih menjadi pusat orientasi sosial ekonomi warga dalam suku.

Pengembangan kelembagaan berbasis suku juga berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap suku. Kelembagaan suku berperan dalam kehidupan masyarakat Mentawai, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan; pada tingkat kelompok suku; tingkat komunitas dan kerjasama kelompok dengan organisasi supra desa (Erwin, 2007)

Ada sejumlah kelemahan dari kelembagaan lokal berbasis suku, maka diperlukan berbagai cara, antara lain;

- 1) Memberikan pendampingan dan memfasilitasi pengurus kelompok dalam menyusun Ad dan ART.
- 2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, dan penataan administrasi dan keuangan kelembagaan.
- 3) Penguatan kapasitas kelembagaan menyusun rencana kerja dan membuka jaringan dan menghubungkannya dengan kelembagaan supra-desa, baik pemerintah, swasta dan NGO Nasional dan Internasional.
- 4) Menggunakan metode partisipatif dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghimpun partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan kelembagaan lokal berbasis suku akan memiliki kemampuan dalam : (1) Manajemen sumber daya alam berbasis pertanian lokal (pertanian organik), pengelolaan hutan di luar kawasan Taman Nasional. (2) Pengelolaan pariwisata budaya berbasis masyarakat

## **PEMBAHASAN**

### **Modal Sosial dalam Masyarakat**

Keberadaan modal sosial dalam masyarakat menentukan cepat atau lambatnya suatu masyarakat mewujudkan kesejahteraannya. Pada masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, keberadaan modal sosial dalam masyarakat tinggi, walau tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah dibandingkan dengan masyarakat Indonesia umumnya. Hal ini berhubungan erat dengan ukuran kesejahteraan, secara relatif berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Adanya pendapat yang mengatakan, tinggi atau rendahnya modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas berbanding lurus dengan dengan kualitas



pembangunan manusia pada setiap komunitas terbantahkan atau tidak berlaku pada masyarakat Mentawai di Pulau Siberut.

Ukuran yang digunakan bahwa modal sosial pada komunitas adat terpencil di Pulau Siberut tinggi adalah; (a) adanya kemampuan dalam masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan secara bersama-sama; (b) adanya kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki nasib secara bersama-sama; (c) adanya kerja sama untuk memperbaiki kualitas hidup; (d) masih terpeliharanya rasa saling percaya antara sesama warga, akan memudahkan pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten untuk menjalankan berbagai kebijakan yang berorientasi untuk mensejahterakan dan memajukan rakyatnya.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah, karena terbangun relasi sosial saling percaya-mempercayai. Prinsip keselarasan dan harmoni dengan sesama manusia dan dengan sistem lingkungan menjadi dasar dari cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak dari masyarakat Mentawai. Sistem nilai dan norma yang mengatur interaksi sosial sesama manusia dan interaksi manusia dengan lingkungan fisik pada masyarakat Mentawai, terbingkai dalam sistem kepercayaan dan sistem pengetahuan, dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Mentawai.

Masyarakat yang tinggal di desa pedalaman, di lihat dari ketersediaan pangan lokal tidak miskin. Masyarakatnya hidup di tanah yang subur dan sumberdaya alam yang melimpah ruah. Kosa kata miskin dilekatkan pada masyarakat Mentawai karena pengertian pangan adalah beras dan beras tidak mereka hasilkan, sementara pangan lokal, sagu, keladi dan pisang

tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan.

Tradisi yang telah berkembang secara turun temurun sebagai sumber terciptanya sistem nilai dan sistem norma yang terlihat pada relasi sosial antar anggota suku dan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Tatanan sosial yang terbangun merupakan produk kebiasaan yang turun temurun, dan kemudian melahirkan modal sosial. Relasi sosial yang terbangun dalam kelembagaan lokal berbasis suku terpelihara dan menjadi entitas sosial yang bersifat kolektif dan mendorong tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari untuk saling bekerja sama, tolong menolong, saling berbagi hasil buruan atau tangkapan. Keberhasilan individu menjadi ukuran di dalam kelompok, akan tetapi diketahui masyarakat adalah keberhasilan kelompok. Diberbagai arena sosial dalam komunitas, masyarakat Mentawai lebih mengedepankan keberhasilan kelompok dan sentimen kolektif. Ekspresi dari keberhasilan kelompok disampaikan kepada anggota komunitas desa, dengan bunyi-bunyian yang bersumber dari alat musik tradisi.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pada masyarakat Mentawai, seringkali mengabaikan sistem nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Pada beberapa kasus, ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat di larang dan peralatan upacara yang digunakan dihancurkan. Asumsi pembangunan yang menempatkan kebudayaan lokal sebagai penghambat pembangunan dalam banyak hal telah melahirkan sikap dan perilaku apatis, kehilangan jati diri, merasa inferior saat berinteraksi dengan suku bangsa lain (Erwin, 2007).

Pola relasi sosial yang ada pada masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, memiliki karakteristik dan merupakan *strategi of survival* yang khas. Relasi sosial dengan sesama

manusia dan dengan lingkungan fisik yang di bangun selama bertahun-tahun oleh masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, sarat makna, di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan lokal. Bagi masyarakat Mentawai di Pulau Siberut, sistem nilai dan norma yang menyelimuti relasi sosial antara sesama manusia dan dengan lingkungan fisik, akan membentuk energi sosial kolektif yang akan mereka gunakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dalam masyarakatnya. Rasa saling-percaya (trust) tumbuh berkembang melintasi batas-batas budaya, potensi kelembagaan lokal berbasis suku, dapat digunakan dalam pembangunan Mentawai di masa datang.

Pada beberapa kasus, terlihat ada perilaku yang bersifat destruktif yang muncul dari dalam masyarakat, biasanya lebih disebabkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Konsep energi sosial menunjuk pada tiga aspek, yaitu: (a) gagasan dasar yang disepakati tentang suatu tujuan positif, (b) harapan atau cita-cita yang disepakati tentang wujud tujuan yang ingin raih, dan (c) kebersamaan dalam upaya mencapai tujuan itu. Energi sosial itu lazimnya terdapat pada satuan lokalitas yang berorientasi untuk kesejahteraan bersama. Selain itu ia juga dapat digali dari praktek kepemimpinan dari tokoh dalam masyarakat yang diakui secara riil-faktual, bukan sebatas karena kedudukannya secara ideal-normatif saja ( Erwin, 2006)

Pada setiap masyarakat tersedia keragaan kelembagaan dan kepemimpinan yang dapat dikelola menjadi modal sosial dan instrumen pembangunan. Keragaannya dapat bervariasi antara desa satu dengan desa lainnya di Pulau Siberut. Keragaan lembaga dan kepemimpinan formal di tingkat desa dapat diharapkan menjadi energi sosial, sambil mengupayakan revitalisasi dan inovasi pengembangan energi sosial pascatradisional yang lebih adaptif. Keragaan

energi sosial yang tertata dan relatif mapan, yang ditandai adanya kelompok-kelompok kerjasama antar keluarga, maupun kerjasama teritorial antar tetangga dan antar dusun. Terdapat juga energi sosial yang merupakan hasil inovasi penduduk lokal di pemukiman baru, didasarkan pada kedekatan rumah atau tempat tinggal.

### **Model Pemberdayaan Masyarakat**

Kemiskinan disebabkan oleh kegagalan kelembagaan dan pertukaran yang tidak seimbang, tidak adil dalam proses tukar menukar komoditas dan pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa orang miskin atau rumah tangga miskin oleh struktur yang bersifat eksploitatif dan melanggengkan ketergantungan dari rumah tangga miskin. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan yang berpihak pada rumah tangga miskin (Budiman,1996).

Kebijakan yang perlu dikembangkan adalah penciptaan peluang dan kesempatan ekonomi bagi rumah tangga miskin. Strategi penciptaan peluang dan kesempatan ekonomi harus dapat mencakup tiga hal, yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan manajemen usaha.

Masyarakat Mentawai merupakan kelompok yang tidak berdaya, karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan adalah sebuah proses sinergis, dimana para pemangku kepentingan berbagi peran dan melibatkan kelembagaan lokal dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi, yang berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan, masalah, potensi dan peluang ekonomi sesuai

karakteristik lokalitas, wilayah, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Model pemberdayaan rumah tangga miskin, harus diawali dengan perubahan cara pandang, pemamfaatan modal sosial, dan masyarakat setempat menjadi pelaku aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Model pemberdayaan Masyarakat Mentawai melalui penguatan kelembagaan lokal berbasis suku dan revitaliasi pertanian lokal. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk menghilangkan hambatan sosial, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas kelembagaan. Modal sosial yang tinggi dicirikan dengan berfungsinya kelembagaan masyarakat dengan baik. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan kelembagaan, didasarkan kepada pemahaman yang utuh terhadap ragam dan sifat modal sosial yang mereka miliki, sehingga rancangan kelembagaan akan menjadi lebih tepat.

Pemberdayaan menurut Parsons (1994) mencakup tiga dimensi (1) sebuah proses pembangunan yang di mulai dari pertumbuhan individual, berkembang menjadi sebuah perubahan sosial; (2) sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, rasa berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain; (3) pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Tenaga pendamping diperlukan untuk memfasilitasi dan terlibat membantu kelompok untuk memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan

seperti: (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat, (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, kehadiran lembaga keuangan mikro akan sangat membantu mereka mendapatkan pinjaman modal untuk kelancaran usaha mereka dan akan memperkuat *bargaining position* serta *self esteem* masyarakat miskin. Pada beberapa kasus, program anti-kemiskinan yang dilakukan pada masyarakat miskin, tidak bisa mengakomodir apa yang dinilai baik oleh masyarakat, sehingga memunculkan resistensi sosial terhadap apa yang dikatakan baik menurut program. Program-program anti-kemiskinan yang dijalankan seringkali mengabaikan sistem nilai dan kearifan lokal yang menjadi modal sosial masyarakat.

Secara umum pada tingkat kebijakan ada ketidaksesuaian, disatu sisi pemerintah menjalankan program beras untuk rumah tangga miskin, namun disisi lain pemerintah mencanangkan program diversifikasi pangan. Pada beberapa kasus, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai misalnya, tidak mengalokasikan dana pendamping untuk distribusi bantuan beras bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga sejak dua terakhir distribusi bantuan beras untuk rumah tangga miskin tidak bisa dilaksanakan.

Penetapan strategi pemberdayaan masyarakat miskin merupakan tahap awal dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan.

Strategi pemberdayaan terhadap rumah tangga miskin, tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas.

Revitalisasi pertanian lokal (pertanian organik) berbasis kelembagaan suku akan dilakukan di Desa Madobag dan Desa Matotonan. Hasil musyawarah dengan perangkat Desa Madobag dan Desa Matotonan, telah tersedia lahan pertanian untuk diolah oleh kelompok usaha produkti dari kedua desa, dengan luas kurang lebih 140 ha. Lokasi tanah berada di sepanjang jalan dari Dusun Rogdog sampai perbatasan dengan dusun Puro.

Sejalan dengan itu, kehadiran Pasar tradisional di Desa Madobag dan lembaga keuangan mikro, bisa dalam bentuk Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa akan sangat membantu masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian dan mendapatkan modal tambahan untuk membesar skala usaha mereka. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin. Karena itu kebijakan dan program memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil seperti pertanian, perikanan, industri rumah tangga yang berbasis pada pertanian lokal atau kepada sektor yang menjadi andalan masyarakat miskin.

## KESIMPULAN

1. Pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan lokal berbasis suku. Pendekatan kelembagaan adalah sebuah proses sinergis, dimana para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbagi peran dan melibatkan kelembagaan lokal dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan,

pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi, yang didasarkan pada pemahaman terhadap kebutuhan, masalah, potensi dan peluang ekonomi sesuai karakteristik lokalitas, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

2. *Simagebak* artinya miskin dan *Simalilimai*, artinya tidak punya apa-apa. Kedua konsep merujuk pada penduduk pendatang. Penduduk pendatang tidak memiliki tanah, kebun atau ladang dan tidak memiliki ternak. Ketersediaan pangan lokal (sagu, keladi dan pisang) dalam jumlah lebih dari cukup. Artinya, dari pemenuhan kebutuhan pangan lokal tidak ada rumah tangga miskin pada masyarakat Mentawai di Pulau Siberut.
3. Penguatan kelembagaan lokal berbasis suku akan dilakukan dengan: (1) Memberikan pendampingan dan memfasilitasi pengurus kelompok dalam menyusun AD dan ART. (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, dan penataan administrasi dan keuangan kelembagaan. (3) Penguatan kapasitas kelembagaan menyusun rencana kerja dan membuka jaringan dan menghubungkannya dengan kelembagaan supra-desa, baik pemerintah, swasta dan NGO Nasional dan Internasional. (4) Menggunakan metode partisipatif dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghimpun partisipasi masyarakat.

## SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, diharapkan memperkuat Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan menyiapkan dokumen Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen SPKD berisikan:
  - a. Data tentang fenomena kemiskinan dan target yang ingin di capai.
  - b. Terkoordinasinya program berbagai lintas sektor dan terbangunnya sinergitas

- berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan.
- c. Tersusunnya program yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan memperluas kerja sama dengan Kementerian Daerah Tertinggal dan Kementerian Sosial RI untuk;
- (a) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar desa di pedalaman; (b) Pembangunan pasar tradisional di desa pedalaman; (c) Menghadirkan lembaga keuangan mikro, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi, semoga Allah swt memberikan ganjaran yang setimpal. Kepada Bapak Kepala Desa Madobak dan Kepala Desa Matatonan serta perangkatnya yang telah banyak membantu peneliti selama pengumpulan data di kedua desa. Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman YKI dan TNS, atas bantuan dan kerja samanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (1995). Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan. Dalam Awan Setya Dewanta dkk., ed, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Erwin. (2006). *Tanah Komunal: Melemahnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Pedesaan Minangkabau*. Padang : Penerbit Universitas Andalas Pers.
- Erwin. (2007). *Pembangunan Sosial pada Masyarakat Mentawai di Pulau*
- Siberut*. Dalam Nursyirwan Effendi dan Lucky Zamzami. *Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat Lokal*. Padang : Penerbit Laboratorium Antropologi Fisip Unand.
- Besley, T. (1996). *Political Economy Of Alleviating Poverty: Theory And Institution. "Annual World Bank Conference On Development Economics 1996"*. The World Bank, Washington D.C.
- Biro Pusat Statistik. (2010). *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka*. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Padang.
- Biro Pusat Statistik. (2013). *Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka*. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tua Pejat.
- Budiman, A. (1996). *Kemiskinan, Pemiskinan, Dan Peran Agama: Sebuah Peta Pemikiran*. Dalam Iman, Ekonomi Dan Ekologi: Refleksi Lintas Il-Mu Dan Lintas Agama (J.B. Banawiratama,Sj. Dkk.). Yogyakarta : Kanisius.
- Mubyarto, (1998). *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Parsons, R. J., Jorgensen, J.D.Z., Hernandez, H.S. (1994). *The Integration Of Social Work Practice*. California : Wadsworth, Inc.
- Peraturan Menteri Sosial, Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2006). *Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010: Agenda-6*

*Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan.* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Rudito, B. (2013). *Bebeitei Uma, Kebangkitan orang Mentawai.* Jakarta: ICSD.

Sitorus, M.T.F. et. al. (1991). *Wanita dan Kemiskinan: Studi tentang Status Wanita dalam Rumahtangga Miskin.* Laporan Hasil Penelitian. BOGOR: BPPS Depsos RI- PSP LP IPB - PSW UNAND.

Suparlan, P. (1994). *Kemiskinan di Perkotaan.* Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.